

## DAFTAR PUSTAKA

### *Buku*

- C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- Elyta Ras Ginting, 2018, *Hukum Kepailitan, Buku Kesatu, Teori Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta
- ., 2019, *Hukum Kepailitan, Buku Ketiga, Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, Sinar Grafika, Jakarta
- H. Man S. Sastrawidjaja, 2006, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 4 Tahun 1998, (Suatu Telaah Perbandingan)*, Alumni, Bandung
- H. Salim HS, dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta
- I Ketut Oka Setiawan, dan Tetti Samosir, 2023, *Metodologi Penelitian Hukum*, Penerbit Reka Cipta, Bandung
- Lilik Mulyadi, 2010, *Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Teori dan Praktik*, Penerbit PT Alumni, Bandung
- Maria SW. Sumardjono, 2021, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
- Munir Fuady, 2005, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- M. Hadi Shubhan, 2019, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Pengadilan*, Kencana, Prenadamedia Group, Jakarta
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT Bina Ilmu, Surabaya
- Rudhy A. Lontoh, Denny Kailimang, dan Benny Ponto, 2001, *Penyelesaian Utang-Piutang, Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Penerbit Alumni, Bandung

- Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Siti Anisah, 2008, *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor Dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*, Total Media, Yogyakarta
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Sudargo Gautama, 1998, *Komentar atas Peraturan Kepailitan Baru untuk Indonesia (1998)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Jogjakarta
- Sutan Remy Sjahdeini, 2009, *Hukum Kepailitan. Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta
- ., 2018, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan. Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Edisi Kedua*, Prenadamedia Group, Jakarta
- Tim Redaksi Tatanusa, 2017, *Kepailitan & PKPU Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, PT Tatanusa, Jakarta

### **Artikel Jurnal**

- Aditya Yuli Sulistiawan dan Aldio Fahrezi Permana Atmaja, “Arti Penting Legal Reasoning Bagi Hakim Dalam Pengambilan Putusan di Pengadilan untuk menghindari “Onvoldoende Gemotiveerd””, *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 6, No. 2, Oktober 2021
- Enju Juanda, “Penalaran Hukum (Legal Reasoning)”, *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol. 5, No. 1, Maret 2017
- Habibul Umam Taquiuddin, “Penalaran Hukum (Legal Reasoning) Dalam Putusan Hakim”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Vol. 1, No. 2, November 2017
- H. M. Laica Marzuki, “Judicial Review Di Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 1, No. 3, November 2004

### **Hasil Penelitian/Tugas Akhir**

- Fadli Rahman Wahidi, 2023, *Pemberlakuan Upaya Kasasi Pada Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berdasarkan Nilai Keadilan*,

Tesis, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang

Rian Hidayat, 2023, *Peluang dan Tantangan: Kasasi Terhadap Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021)*, Tesis, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

### ***Makalah/Pidato***

Jamaslin James Purba, “Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 23/PUU-XIX/2021 Dalam Praktek Beserta Akibat Hukumnya”, *Makalah*, Pendidikan Lanjutan Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI), Medan, 25 Maret 2022

### ***Internet***

Hukumonline.com, “Tips Membuat Proposal Perdamaian dalam Kepailitan dan PKPU”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tips-membuat-proposal-perdamaian-dalam-kepailitan-dan-pkpu-lt5e57a47ed0725/>, diakses 27 Mei 2024.

Mahkamah Konstitusi, “Mahkamah Konstitusi”, <https://mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=10961>, diakses 21 Mei 2024

Mahkamah Konstitusi, “Peran dan Fungsi Mahkamah Konstitusi”, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=10958>, diakses 21 Mei 2024

### ***Peraturan Perundang-undangan***

Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan

Umum, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158).

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6554).

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4443).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143).

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

### ***Putusan Pengadilan***

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 perihal Pengujian Pasal 235 ayat (1), Pasal 293 ayat (1), Pasal 295 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 15 Desember 2021.

Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 85/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Jkt.Pst perihal Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang oleh PT Bank Jtrust Indonesia, Tbk. terhadap PT Group Lease Finance Indonesia, 7 Juni 2022.

Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 85/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Jkt.Pst perihal Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang oleh PT Bank Jtrust Indonesia, Tbk. terhadap PT Group Lease Finance Indonesia, 21 Juli 2022.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1494K/Pdt.Sus-Pailit/2022 perihal Kasasi Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang oleh PT Group Lease Finance Indonesia terhadap PT Bank Jtrust Indonesia, Tbk, 10 Oktober 2022.

### ***Wawancara***

Jonggi Siallagan, Kuasa Hukum PT Bank Jtrust Indonesia, Tbk., Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi No. 23/PUU-XIX/2021 Tentang Upaya Hukum Kasasi Terhadap Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dikaitkan Dengan Putusan Kasasi No. 1494 K/Pdt.Sus-Pailit/2022, *Hasil Wawancara*, Jakarta, 26 April 2024.

Tonggo P. Silalahi, Ketua Dewan Kehormatan Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia, Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi No. 23/PUU-XIX/2021 Tentang Upaya Hukum Kasasi Terhadap Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dikaitkan Dengan Putusan Kasasi No. 1494 K/Pdt.Sus-Pailit/2022, *Hasil Wawancara*, Jakarta, 3 Mei 2024.